



► INDEKS KERUKUNAN DIY

Intoleransi Banyak Terjadi di Perkotaan

DANUREJAN—Sejumlah tokoh lintas agama di DIY menilai tindakan intoleransi lebih banyak terjadi di wilayah perkotaan. Oleh karena itu wilayah perkotaan harus mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah yang memiliki wewenang dalam regulasi.

Sunartono
sunartono@harianjogja.com

Di sisi lain semangat toleransi di tengah masyarakat perlu terus dikampanyekan. Berdasarkan data Kementerian Agama (Kemenag) yang dirilis Senin (20/12), DIY masuk 10 besar indeks kerukunan umat beragama terbaik di Indonesia.

► Semangat toleransi di tengah masyarakat perlu terus dikampanyekan.

► Berdasarkan data Kemenag yang dirilis Senin (20/12), DIY masuk 10 besar indeks kerukunan umat beragama terbaik di Indonesia.

Wakil Sekretaris Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (Lakpesdam) PBNU KH Umaruddin Masdar khawatir membaiknya indeks kerukunan DIY yang masuk 10 besar terbaik nasional disebabkan karena pandemi Covid-19 sebagai akibat dari pembatasan masyarakat.

Ia berharap indeks itu terus membaik meski nanti pandemi Covid-19 telah berakhir. Benih

intoleransi di DIY menurutnya bisa saja muncul kapan saja, salah satunya melalui unsur pendidikan.

"Maka pemerintah melalui regulasinya harus berusaha mencegah, jangan sampai memberikan ruang pada kelompok tertentu, radikal berkembang. Kami khawatir sebenarnya jangan-jangan membaiknya indeks ini karena pandemi, aktivitas di rumah, kami khawatir setelah pandemi ada lagi," ucap tokoh NU Bantul ini dalam *Deklarasi Damai Lintas Agama* di salah satu hotel di Jogja.

Tokoh dari Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Anak Agung Alit Merthayasa mengatakan hasil indeks memang belum sepenuhnya menjadi gambaran kondisi kerukunan di DIY karena bersifat survei penelitian. Namun upaya pencegahan intoleransi harus terus dilakukan melalui

berbagai kebijakan pemerintah. Ia mencontohkan, pemerintah sebaiknya meninjau terkait perizinan perumahan yang bersifat eksklusif untuk kelompok tertentu.

Tindak Lanjut Hukuman

Ketua DPD Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) Sleman Soelistijono yang hadir menambahkan, campur tangan pemerintah serta lembaga negara sangat penting dalam rangka mencegah terjadinya intoleransi. Terutama dalam melakukan tindak lanjut hukuman terhadap pelaku intoleran.

Terkait dengan kejadian yang lebih banyak di perkotaan, menurutnya harus menjadi perhatian tersendiri oleh pemerintah dengan melakukan program pencegahan.

"Bukan berarti menyalahkan pemerintah, tetapi karena memang

pemerintah yang memiliki kekuatan dengan berbagai regulasinya. Kalau kami dari forum umat beragama hanya bisa mengimbau kepada umat, kami tentu berharap indeks kerukunan ini terus membaik" katanya.

Pusat Kajian Demokrasi dan HAM Universitas Sanata Dharma Baskara T Wardaya SJ menyatakan dalam berbagai peristiwa intoleransi di DIY perlu dilihat secara menyeluruh. Salah satunya pelaku kerap berasal dari orang luar DIY atau belum lama tinggal di DIY.

Ia menambahkan tindakan intoleransi lebih banyak terjadi di perkotaan karena perpindahan penduduk secara masif dan sulit terpantau. Berbeda dengan di desa, mobilitas pendatang bisa dipantau sekaligus memantau aktivitas masyarakat dengan mudah.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 10 Juli 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005